Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

DYNAMIC SECURITY DALAM MITIGASI KONFLIK ANTARKELOMPOK ETNIS DI RUTAN KELAS I BANDUNG

Muhammad Fajar Pratama[1], Mitro Subroto, Bc.Ip., S.IP., M.Si.[2]
[1]Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Indonesia
[2]Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Indonesia
[1]pfajar801@gmail.com, [2]subrotomitro07@gmail.com

ABSTRACT

Individual disputes in detention can escalate when associated with group solidarity and perceived unfairness. This study analyses dynamic security practices for mitigating interethnic group conflict at Bandung Class I Detention Centre and their supporting and constraining factors. A descriptive qualitative approach was used, drawing on in-depth interviews with ten purposively selected informants, comprising eight staff members and two detainees. Data were analysed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data condensation, display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that regional friendships can support adjustment but may restrict social interaction when accompanied by group pressure. Reported dynamic security practices include professional communication, fair services, recognition of behavioural changes, information verification, coordination between shifts, and follow-up after tensions. Leadership guidance, information sharing, detainee trust, and shared activities supported implementation. Crowded accommodation, surveillance limitations, workload, rumours, and uneven documentation constrained continuity. Professional relationships therefore require consistent rules and clear complaint follow-up. Detainees' perceived safety should inform evaluation alongside visible order. The study clarifies the relationship between service fairness, information disclosure, and continuity of conflict management. The findings describe interview-based practices rather than establish a causal reduction in conflict.

***Keywords**: dynamic security; intergroup conflict; service fairness; early detection; detention centre*

ABSTRAK

Konflik di rumah tahanan dapat meluas ketika perselisihan antarindividu dikaitkan dengan solidaritas kelompok dan persepsi ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dynamic security dalam mitigasi konflik antarkelompok etnis di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas delapan petugas dan dua tahanan. Analisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan pemeriksaan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertemanan sedaerah dapat membantu penyesuaian diri, tetapi juga dapat membatasi kebebasan bergaul apabila disertai tekanan kelompok. Penerapan dynamic security dijelaskan melalui komunikasi profesional, pelayanan

yang adil, pengenalan perubahan perilaku, verifikasi informasi, koordinasi antarregu, dan pemantauan setelah ketegangan. Arahan pimpinan, pertukaran informasi, kepercayaan tahanan, dan kegiatan bersama mendukung pelaksanaan. Hambatannya meliputi kepadatan hunian, keterbatasan pengawasan, beban kerja, rumor, serta pencatatan yang belum seragam. Penelitian menyimpulkan bahwa hubungan profesional perlu disertai aturan yang konsisten dan tindak lanjut keluhan yang jelas. Rasa aman tahanan menjadi pertimbangan evaluasi bersama ketertiban yang terlihat. Kontribusi penelitian berupa penjelasan hubungan antara keadilan layanan, keterbukaan informasi, dan kesinambungan penanganan konflik. Temuan menggambarkan praktik berdasarkan keterangan informan dan belum menunjukkan besarnya penurunan konflik secara kausal.

Kata kunci: dynamic security; konflik antarkelompok; keadilan layanan; deteksi dini; rumah tahanan

A. Pendahuluan

Keamanan rumah tahanan berkaitan erat dengan hubungan sosial penghuninya. Perbedaan latar belakang, kebutuhan, dan jaringan pertemanan memengaruhi cara tahanan menafsirkan ucapan, penggunaan fasilitas, maupun keputusan petugas. Perselisihan pribadi dapat meluas ketika pihak lain ikut membela seseorang atas dasar kedekatan kelompok. Pengamanan karena itu perlu menjangkau terbentuknya ketegangan melalui komunikasi, pemahaman perilaku, dan penanganan keluhan. Keberagaman etnis merupakan konteks hubungan sosial yang perlu dipahami dengan cermat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan nondiskriminasi, kemanusiaan, proporsionalitas, dan profesionalitas sebagai asas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Pasal 20 ayat (4) juga mengaitkan penempatan tahanan dengan asesmen risiko dan kebutuhan, selain usia serta jenis kelamin. Kerangka tersebut memberi dasar bagi pengamanan yang memperhatikan keselamatan tanpa menjadikan asal etnis sebagai ukuran risiko secara otomatis (Republik Indonesia, 2022). Pengaturan keamanan dan ketertiban selanjutnya mengacu pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024, yang mengatur pencegahan, penindakan, dan pemulihan pada satuan kerja pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024).

Dynamic security menekankan komunikasi rutin, pengenalan terhadap penghuni, hubungan

profesional, dan keterlibatan petugas dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini merupakan bagian dari kerangka pengamanan bersama keamanan fisik dan prosedural. Informasi yang diperoleh melalui interaksi memungkinkan petugas memahami perubahan situasi sebelum gangguan berkembang, dengan tetap menjaga batas profesional dan kewenangan (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2015). Dengan demikian, relasi yang baik perlu menghasilkan informasi yang dapat diperiksa dan tindakan yang dapat ditindaklanjuti.

Kajian di Indonesia telah membahas beberapa sisi persoalan tersebut. Prakoso et al. (2024) menemukan interaksi asosiatif maupun disosiatif di Rutan Kelas IIB Salatiga, sehingga pergaulan di institusi penahanan dapat mengandung kerja sama sekaligus persaingan. Windani dan Tandyasraya (2024) mengkaji persoalan konflik penghuni serta kepadatan dalam manajemen keamanan dan ketertiban di Lapas "X". Sementara itu, Subroto dan Pamuna (2024) membahas pendekatan *dynamic security* yang memperhatikan kebutuhan warga binaan lanjut usia. Penelitian ini memperluas pembahasan pada hubungan antara identitas kelompok, layanan, dan alur penanganan ketegangan di rumah tahanan.

Literatur internasional juga memperlihatkan batas penerapan pengamanan relasional. Kilmer et al. (2023), dalam penelitian di Halden, Norwegia, menemukan bahwa *dynamic security* dapat mendukung legitimasi petugas, sementara keterlibatan petugas dalam rehabilitasi tetap menghadapi resistensi terkait persepsi tentang perannya. Day et al. (2026) menyoroti ketidakseragaman penerapan ketika standar profesional dan pelatihan belum jelas. Selain itu, tinjauan Day et al. (2022) menunjukkan bahwa bukti evaluasi intervensi pencegahan kekerasan masih lebih terbatas daripada pengetahuan mengenai bentuk kekerasannya. Karena itu, keterangan tentang praktik perlu dibedakan dari bukti efektivitas intervensi.

Teori identitas sosial membantu menjelaskan hubungan antara keanggotaan kelompok, perbandingan sosial, dan penilaian terhadap kelompok lain (Tajfel & Turner, 1979). Kerangka ini digunakan

untuk membaca perluasan persoalan individu menjadi ancaman terhadap kehormatan bersama. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan bagaimana keadilan layanan dan kepercayaan membuka penyampaian informasi, serta bagaimana koordinasi menjaga kesinambungan penanganan. Penelitian bertujuan menganalisis penerapan *dynamic security* dalam mitigasi konflik antarkelompok etnis di Rutan Kelas I Bandung, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan implikasi penguatan pengamanan berdasarkan perspektif petugas dan tahanan.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada praktik pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Artikel dikembangkan dari data penelitian skripsi penulis pertama tahun 2026. Data utama berupa transkrip wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatannya dalam kebijakan, pengamanan harian, pelayanan, atau pengalaman kehidupan di Rutan. Informan terdiri atas delapan petugas dan dua tahanan sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Keterangan tahanan memberikan perspektif individual mengenai hubungan sosial, pelayanan, dan rasa aman.

Tabel 1 Komposisi informan penelitian

Kelompok informan	Jumlah
Kepala Rutan	1
Kepala Kesatuan Pengamanan	1
Kepala Seksi Pelayanan Tahanan	1
Kepala regu pengamanan	2
Petugas pengamanan	3
Tahanan	2
Jumlah	**10**

Sumber: transkrip wawancara penelitian penulis pertama.

Wawancara membahas pertemanan sedaerah, solidaritas kelompok, keadilan layanan, penggunaan fasilitas, tanda ketegangan, pengawasan, pelaporan, komunikasi petugas, dan kegiatan bersama. Cakupan tersebut memungkinkan pembandingan antara

kebijakan, pengalaman pelaksana, dan kebutuhan tahanan. Keterangan mengenai pengalaman langsung, contoh kemungkinan kejadian, serta harapan informan dibedakan agar penafsiran tetap sesuai dengan isi wawancara.

Analisis mengikuti model interaktif Miles et al. (2014) melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan pemeriksaan kesimpulan. Keterangan yang relevan dipilih dan disajikan dalam narasi tentang dinamika kelompok, komunikasi, deteksi dini, penanganan ketegangan, serta kondisi pelaksanaannya. Kesimpulan diperiksa dengan membandingkan keterangan antarinforman dan menelusuri kembali pernyataan yang mendasari penafsiran. Teori identitas sosial dan konsep *dynamic security* digunakan untuk menjelaskan keterkaitan temuan.

Identitas pribadi disamarkan; kutipan disertai nomor informan untuk menunjukkan sumber keterangan. Pembandingan pandangan petugas dan tahanan memperhatikan persamaan maupun perbedaan penilaian mereka. Analisis dibatasi pada wawancara yang tersedia. Pengamatan yang diceritakan petugas diperlakukan sebagai isi wawancara, bukan observasi langsung peneliti. Temuan menjelaskan praktik dan kondisi pelaksanaan pada lokasi penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinamika Pertemanan dan Potensi Konflik Antarkelompok

Pertemanan sedaerah membantu sebagian tahanan menyesuaikan diri pada awal penahanan. Kedua tahanan yang diwawancarai mengaitkan kedekatan tersebut dengan kesamaan bahasa, kebiasaan, dan kemudahan memulai percakapan. Mereka tetap membuka hubungan lintas daerah dan menilai kualitas komunikasi sebagai pertimbangan dalam berteman. Kedekatan kelompok dengan demikian berfungsi sebagai dukungan sosial, sementara pertemanan juga dapat berkembang melalui pengalaman interaksi sehari-hari.

Potensi konflik muncul ketika solidaritas disertai tekanan untuk membatasi pergaulan, menyembunyikan informasi, atau mengikuti pembalasan. Kedua tahanan menceritakan tatapan dan komentar yang membebani

pertemanan lintas daerah. Mereka juga menyampaikan pilihan untuk menenangkan teman dan mencari kejelasan sebelum mengambil sikap. Pilihan individual ini penting bagi pencegahan perluasan perselisihan. Dukungan kepada teman dapat diwujudkan melalui penenangan dan pencarian penyelesaian, sehingga solidaritas tidak harus berakhir pada pertengkaran.

Dari perspektif petugas, pengawasan diarahkan pada intimidasi, pembatasan akses fasilitas, perubahan kerumunan, serta provokasi. Kepala Rutan membedakan penghormatan terhadap budaya dari penggunaan identitas kelompok untuk mengancam atau menggerakkan pembalasan. Kepala regu pengamanan juga menjelaskan perlunya membaca penggunaan bahasa daerah bersama konteks perilaku yang menyertainya: "Penggunaan bahasa daerah itu memang cukup sering terjadi ya, tapi... ee, belum tentu berarti mereka mau menyembunyikan informasi." (Informan 5).

Teori identitas sosial menjelaskan relevansi keanggotaan kelompok dalam penilaian perlakuan, kedudukan, dan kehormatan bersama (Tajfel & Turner, 1979). Pada kasus ini, petugas perlu mengenali saat persoalan individu mulai memperoleh makna kolektif. Penilaian risiko mengikuti perilaku, riwayat perselisihan, dan hubungan antarpihak. Penyebutan Aceh, Ambon, Sunda, atau Palembang dalam wawancara menggambarkan kategori hubungan menurut informan. Keterangan tersebut perlu dipahami secara kontekstual agar penanganan tidak memperkuat pelabelan kelompok.

Komunikasi Profesional dan Keadilan Pelayanan

Komunikasi profesional terlihat melalui kesediaan mendengarkan, menjelaskan aturan, dan memberi kejelasan tindak lanjut. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan menerangkan bahwa layanan makan, kesehatan, kunjungan, dan fasilitas diberikan berdasarkan ketentuan serta kebutuhan. Keluhan mengenai perbedaan perlakuan diperiksa melalui kejadian, jadwal, atau catatan yang relevan. Kekeliruan ditindaklanjuti dengan perbaikan dan penjelasan kepada pengadu. Keadilan pelayanan dengan demikian mencakup kesempatan

menyampaikan masalah serta alasan yang dapat dipahami ketika keputusan berbeda dari harapan tahanan.

“Soalnya kepercayaan itu nggak dibangun lewat janji manis seolah semua permintaan pasti dipenuhi ya... tapi lewat kejelasan sama konsistensi tindak lanjutnya.” (Informan 3).

Tahanan menilai penjelasan yang tenang lebih mudah diterima daripada teguran yang merendahkan. Mereka juga berharap memperoleh informasi yang konsisten ketika bertanya kepada petugas berbeda. Harapan ini menunjukkan kebutuhan akan kepastian aturan dan jalur penyelesaian. Perbedaan jawaban dapat menyulitkan tahanan memahami kewajiban maupun cara menyampaikan keberatan. Konsistensi komunikasi karena itu menjadi bagian dari pelayanan yang dapat dipercaya.

Kesediaan menyampaikan informasi juga berkaitan dengan perlindungan pelapor. Petugas menekankan kerahasiaan identitas sumber dan penerusan informasi sesuai kewenangan. Tahanan mempertimbangkan kemungkinan dipermalukan, kejelasan proses pelaporan, dan kesempatan kedua pihak didengar. Keterbukaan membutuhkan keyakinan bahwa laporan diperiksa secara adil dan tidak menambah tekanan sosial. Seorang tahanan menjelaskan pentingnya sikap mendengarkan serta tindak lanjut yang jelas:

“Kalau petugas mau mendengarkan dari kedua belah pihak... terus menjelaskan langkah tindak lanjutnya gimana, itu bikin saya jauh lebih mudah buat berbicara terbuka.” (Informan 10).

Temuan ini sejalan dengan penelitian longitudinal Beijersbergen et al. (2015), yang menemukan hubungan antara persepsi perlakuan yang adil dan lebih rendahnya pelanggaran pada pengukuran berikutnya, dengan kemarahan sebagai mediator. Penelitian Bandung tidak menguji hubungan statistik tersebut, tetapi memperlihatkan bagaimana penjelasan layanan dan penghormatan dapat menjadi syarat keterbukaan komunikasi. Implikasi analitisnya ialah bahwa keadilan layanan perlu diperhatikan sebagai bagian dari pengamanan: alasan keputusan dan tindak lanjut keluhan dapat memengaruhi kesediaan tahanan menyampaikan masalah lebih awal.

Deteksi Dini dan Koordinasi Pengamanan

Deteksi dini berlangsung melalui pengenalan perubahan kebiasaan penghuni. Petugas menyebut nada bicara meninggi, kerumunan mendadak, penghindaran fasilitas, memar, dan keengganan berinteraksi sebagai tanda yang perlu diperiksa. Perubahan tersebut menjadi dasar untuk mendekati pihak terkait dan meminta penjelasan. Pembacaan beberapa tanda secara bersamaan, disertai pengetahuan tentang kebiasaan penghuni, membantu petugas memahami situasi sebelum ketegangan berkembang.

Verifikasi dilakukan setelah tanda awal dikenali. Kepala Kesatuan Pengamanan menjelaskan pemeriksaan beberapa sumber dan upaya menghindari ketergantungan pada satu kelompok. Bagian pelayanan membedakan dugaan dari pengamatan langsung dalam laporan keselamatan. Kedua tahanan juga mengakui perlunya menjelaskan batas pengetahuan mereka. Pembandingan sumber membantu memeriksa rumor sebelum keputusan diambil. Informasi yang belum lengkap tetap dapat menjadi alasan kewaspadaan, sambil diperiksa sesuai tingkat urgensinya.

Informasi yang diperoleh dari interaksi perlu diteruskan kepada petugas yang berwenang menindaklanjuti. Kepala regu pengamanan menempatkan pergantian regu sebagai bagian penting dari kesinambungan penanganan:

“Informasi mengenai keluhan, perselisihan, atau kondisi-kondisi yang emang perlu dipantau itu harus disampaikan dengan jelas.” (Informan 5).

Sebagian petugas menyampaikan persoalan kecil saat serah terima meskipun tidak selalu menulisnya secara rinci. Pelaporan lisan membantu kecepatan komunikasi, tetapi perkembangan masalah memerlukan catatan yang dapat ditelusuri. Hubungan profesional membuka akses informasi, sedangkan prosedur pelaporan menjaga kesinambungan pengelolaannya (UNODC, 2015). Keluhan yang belum selesai perlu diketahui regu berikutnya beserta tindakan yang sudah dilakukan. Pemantauan kemudian dapat berlanjut tanpa mengharuskan

tahanan mengulang seluruh persoalannya.

Penanganan Ketegangan dan Pemulihan Hubungan

Penanganan ketegangan dijelaskan melalui pengurangan kerumunan, pemisahan sementara ketika diperlukan, permintaan penjelasan, dan komunikasi dengan pihak yang berpengaruh. Unsur pimpinan menekankan keselamatan penghuni serta pencegahan pembalasan kolektif. Petugas di lapangan menyebut perlunya meminta bantuan regu dan mengikuti batas kewenangan ketika situasi berisiko. Pendekatan persuasif menjadi bagian dari tindakan pengamanan yang terkoordinasi. Penjelasan mengenai tanggung jawab individu membantu membatasi perluasan perselisihan kepada pihak yang tidak terlibat.

Pemulihan membutuhkan perhatian setelah kerumunan terurai atau pihak yang berselisih dipisahkan. Bagian pelayanan menjelaskan bahwa rasa takut menggunakan fasilitas dapat bertahan ketika keadaan tampak tenang. Pihak terdampak perlu didatangi dan tetap memperoleh layanan dasar yang aman. Kedua tahanan juga berharap pemeriksaan didasarkan pada tindakan masing-masing individu. Penyelesaian karena itu mencakup pemulihan akses, penjelasan, dan pemantauan hubungan. Keselamatan perlu diperiksa dari pengalaman pihak terdampak.

Tokoh informal dapat membantu meredam ketegangan melalui pengaruhnya dalam pertemanan tahanan. Kepala Kesatuan Pengamanan menjelaskan keterlibatan tokoh sebagai mitra komunikasi yang tetap berada dalam batas kewenangan institusi. Pada saat yang sama, bagian pelayanan memberikan kesempatan pengaduan langsung tanpa harus melalui kepala kamar. Kedua jalur tersebut saling melengkapi: komunikasi informal membantu menjangkau kelompok, sedangkan pengaduan pribadi memberi ruang bagi tahanan yang membutuhkan penjelasan atau perlindungan. Pelibatan tokoh perlu menjaga kebebasan penghuni lain untuk menyampaikan masalahnya sendiri.

Olahraga, kegiatan keagamaan, keterampilan, seni, dan kebersihan disebut memberi kesempatan pertemuan lintas kelompok. Sejumlah petugas menuturkan perubahan

berupa sapaan dan komunikasi yang lebih cair setelah kegiatan. Sementara itu, kedua tahanan menyampaikan harapan agar kegiatan berlangsung aman dan manfaatnya terlihat dalam hubungan sehari-hari. Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan perlunya pemantauan setelah kegiatan, karena partisipasi belum dengan sendirinya menjelaskan pemulihan hubungan. Kilmer et al. (2023) juga memperlihatkan adanya hambatan dalam hubungan antara peran petugas dan tujuan rehabilitatif. Makna kegiatan bagi peserta perlu menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan

Faktor pendukung yang disampaikan informan meliputi arahan pimpinan untuk menjaga netralitas, pengarahan regu, pertukaran informasi, kepercayaan tahanan, dan kegiatan bersama. Arahan pimpinan membantu memberi kejelasan mengenai prinsip layanan serta dasar keputusan. Pengarahan dan pertukaran pengalaman memberi kesempatan kepada petugas untuk memahami pola perilaku maupun persoalan yang perlu dipantau. Dari sisi tahanan, respons yang konsisten menyediakan alasan untuk terus berkomunikasi. Dukungan organisasi dan kesediaan penghuni menyampaikan informasi menjadi kondisi yang menunjang pencegahan ketegangan.

Hambatan pelaksanaan mencakup kepadatan hunian, titik pengawasan yang tidak terjangkau kamera, beban tugas, perubahan penghuni, rumor, serta solidaritas yang menutup keterangan. Kepadatan memerlukan pengaturan penggunaan ruang dan fasilitas secara lebih cermat, sementara keterbatasan pengawasan menambah kebutuhan kehadiran petugas. Dalam penelitian ini, kepadatan dipahami melalui keterangan informan dan tidak dihitung menggunakan data kapasitas resmi. Seorang tahanan juga mengingatkan bahwa keterbatasan ruang tidak menjelaskan setiap pertengkaran. Penanganan karena itu tetap memerlukan pemeriksaan terhadap pemicu dan hubungan antarpihak.

Hambatan lainnya adalah kemungkinan kedekatan petugas dianggap sebagai keberpihakan serta perbedaan kemampuan komunikasi. Kehadiran yang rutin perlu disertai

kesempatan yang setara bagi penghuni yang aktif berbicara maupun pendiam. Day et al. (2026) menekankan pentingnya standar profesional dan pelatihan untuk mengurangi ketidakseragaman penerapan *dynamic security*. Dalam kasus Bandung, kebutuhan tersebut terlihat pada penerusan informasi, penjelasan aturan, dan pemantauan keluhan. Dukungan pengaturan kerja diperlukan agar kualitas layanan dan penanganan tidak hanya bergantung pada kemampuan petugas tertentu.

Implikasi Penguatan *Dynamic Security*

Praktik yang dijelaskan informan memperlihatkan keterkaitan antara pengenalan perubahan, komunikasi, pemeriksaan informasi, pembatasan perluasan perselisihan, dan pemantauan pemulihan. Rangkaian tersebut dirangkum pada Tabel 2 untuk memperjelas hubungan antarpraktik. Dalam situasi mendesak, tindakan keselamatan dapat dilakukan sebelum seluruh informasi diperoleh. Tabel ini merupakan rangkuman analitis hasil wawancara yang dapat menjadi bahan pengembangan praktik; penerapannya perlu disesuaikan dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Tabel 2 Rangkaian praktik mitigasi konflik

Tahapan	Praktik utama
Mengenali perubahan	Memperhatikan perubahan perilaku, riwayat hubungan, dan penghindaran fasilitas sebagai dasar pemeriksaan awal.
Membuka komunikasi	Menyediakan percakapan pribadi, menjelaskan aturan, serta menjaga kerahasiaan pihak yang menyampaikan informasi.
Memeriksa informasi	Membandingkan keterangan dan menilai kejelasan sumber sebelum meneruskan informasi untuk ditindaklanjuti.
Membatasi perluasan	Mengurangi kerumunan, meminta dukungan regu, dan menjelaskan tanggung jawab individu kepada pihak terkait.
Memantau pemulihan	Memeriksa akses layanan, rasa aman, dan hubungan sehari-hari setelah ketegangan ditangani.

Sumber: hasil analisis wawancara penelitian.

Temuan memperlihatkan hubungan erat antara pelayanan dan pengamanan. Keluhan tentang fasilitas dapat mengandung pengalaman tekanan yang membutuhkan respons pengamanan. Komunikasi memberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman tersebut, pemeriksaan informasi membantu memahami persoalan, dan

koordinasi memastikan tindak lanjut. Pemantauan selanjutnya menilai apakah pihak terdampak kembali memperoleh akses yang aman. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan keterhubungan ini: keadilan layanan, keterbukaan informasi, dan kesinambungan penanganan merupakan bagian dari praktik pengamanan relasional yang perlu diperhatikan secara bersama.

Penguatan pelaksanaan dapat dilakukan melalui standar informasi minimum saat serah terima yang memuat waktu, lokasi, pihak terkait, sumber keterangan, tindakan awal, dan kebutuhan tindak lanjut. Bagian pelayanan perlu memiliki jalur penerusan keluhan keselamatan serta menyampaikan hasil pemeriksaan sesuai kewenangannya. Pengaturan fasilitas dan kegiatan juga memerlukan dasar pembagian kesempatan yang jelas dan mudah dipahami. Implikasi tersebut selaras dengan orientasi pencegahan dan pemulihan dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024). Pelaksanaannya tetap membutuhkan evaluasi berdasarkan kondisi dan pengalaman penghuni.

Evaluasi Rasa Aman dan Keterbatasan Penelitian

Perspektif tahanan memperluas dasar penilaian keamanan. Seorang tahanan mengingatkan bahwa diam tidak selalu menandakan kenyamanan. Tahanan lainnya menilai perbaikan hubungan dari kesempatan menggunakan fasilitas dan berbicara tanpa rasa terancam, serta menganggap bahwa pemulihan memerlukan waktu dan konsistensi. Keterangan ini menunjukkan perlunya memperhatikan pengalaman penghuni ketika menilai keadaan yang tampak tertib. Kebutuhan terhadap respons petugas dijelaskan sebagai berikut:

“Soalnya kalau keluhan kita enggak didengar... ya saya masih bisa merasa takut, meskipun di sini ada kamera CCTV atau pintu yang terkunci rapet.” (Informan 9).

Evaluasi dapat menggabungkan catatan insiden, akses fasilitas, keluhan berulang, tindak lanjut pengaduan, dan rasa aman yang disampaikan tahanan. Bertambahnya laporan awal perlu diperiksa bersama kondisi lain karena dapat menunjukkan peningkatan kepercayaan maupun bertambahnya

masalah. Pemantauan berulang membantu memahami arti perubahan tersebut. Usulan indikator ini masih memerlukan pengujian; penilaian tentang penurunan konflik membutuhkan data kejadian yang sebanding dari waktu ke waktu. Kebutuhan bukti evaluasi tersebut juga menjadi perhatian dalam tinjauan Day et al. (2022).

Penelitian terbatas pada satu lokasi dengan komposisi informan yang lebih banyak berasal dari petugas dan hanya dua tahanan. Kedua perspektif tahanan belum mencakup seluruh pengalaman penghuni ataupun kelompok etnis. Fokus pertanyaan pada hubungan antarkelompok dan kedudukan institusional informan juga dapat memengaruhi penekanan jawaban. Data observasi dan catatan kejadian belum tersedia untuk memeriksa seluruh keterangan secara independen. Dengan batas tersebut, temuan memberi pemahaman tentang praktik yang dijelaskan pada kasus ini. Pengembangan ke lokasi lain perlu memperhatikan perbedaan kondisi hunian, pelayanan, dan organisasi pengamanan.

D. Kesimpulan

Penerapan *dynamic security* di Rutan Kelas I Bandung, berdasarkan keterangan informan, berlangsung melalui komunikasi profesional, pelayanan yang adil, pengenalan perubahan perilaku, verifikasi informasi, koordinasi antarregu, dan pemantauan setelah ketegangan. Pertemanan sedaerah membantu penyesuaian diri, tetapi dapat menjadi sumber tekanan ketika membatasi pergaulan atau mendorong pembalasan. Mitigasi perlu diarahkan pada perilaku berisiko dan perluasan persoalan individu menjadi tuntutan kolektif. Kepercayaan tahanan, arahan pimpinan, serta pertukaran informasi mendukung pelaksanaan, sedangkan kepadatan, keterbatasan pengawasan, beban kerja, rumor, dan pencatatan yang belum seragam membatasi kesinambungannya.

Penguatan pengamanan disarankan melalui serah terima informasi yang jelas, tindak lanjut keluhan yang konsisten, dan pemantauan akses layanan serta rasa aman. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan bahwa keadilan pelayanan dan hubungan profesional perlu terhubung dengan tindakan

pengamanan yang dapat ditindaklanjuti. Temuan belum mengukur besarnya penurunan konflik secara kausal. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan lebih banyak perspektif tahanan, membandingkan beberapa rutan, serta menggabungkan wawancara, observasi, dan catatan kejadian secara longitudinal untuk menilai perubahan kondisi keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Beijersbergen, K. A., Dirkzwager, A. J. E., Eichelsheim, V. I., van der Laan, P. H., & Nieuwbeerta, P. (2015). Procedural justice, anger, and prisoners' misconduct: A longitudinal study. *Criminal Justice and Behavior, 42*(2), 196–218. https://doi.org/10.1177/0093854814550710

Day, A., Newton, D., Cooke, D., & Tamatea, A. (2022). Interventions to prevent prison violence: A scoping review of the available research evidence. *The Prison Journal, 102*(6), 745–769. https://doi.org/10.1177/00328855221136201

Day, A., Tamatea, A. J., Butcher, L., Daffern, M., Cooke, D., & Polaschek, D. L. L. (2026). "Taller fences or longer tables": Should we rely on dynamic security to prevent prison violence? *The Prison Journal, 106*(2), 157–181. https://doi.org/10.1177/00328855251413754

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285153/permenkumham-no-8-tahun-2024

Kilmer, A., Abdel-Salam, S., & Silver, I. A. (2023). "The uniform's in the way": Navigating the tension between security and therapeutic roles in a rehabilitation-focused prison in Norway. *Criminal Justice and Behavior, 50*(4), 521–540. https://doi.org/10.1177/00938548221143536

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE. https://study.sagepub.com/miles3e

Prakoso, A., Suwartiningsih, S., & Utomo, A. W. (2024). Proses

interaksi antar narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(3), 5126–5137. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10824

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-

Subroto, M., & Pamuna, R. D. (2024). Pendekatan dynamic security terhadap WBP lansia di Lapas Kelas 1 Sukamiskin. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(5), 3319–3329. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15368

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *Handbook on dynamic security and prison intelligence*. United Nations. https://www.europris.org/wp-content/uploads/ep_library/UNODC_Handbook_on_Dynamic_Security_and_Prison_Intelligence.pdf

Windani, C. A., & Tandyasraya, R. (2024). Manajemen operasional keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan berdasarkan studi kasus di Lapas “X”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 18*(1), 65–86. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2024.V18.65-86